

kesadaran individual mereka pada kesadaran palsu. Kursi pemerintahan dan surat suara dijadikan komoditas yang memuat pengetahuan palsu (*pseudo knowledge*). Para calon wakil rakyat berusaha melakukan hegemonisasi dalam kehidupan berpolitik dengan mempersuasi masyarakat untuk mempercayai bahwa mereka mendukung nilai kesetaraan, namun pada kenyataannya tidak selalu seperti itu, terbukti dengan maraknya praktik korupsi yang tidak pernah surut walaupun upaya pemberantasan sudah dilakukan.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Keberadaan ideologi dalam kehidupan sosial membentuk suatu dinamika sosial. Dinamika terbentuk karena ideologi selalu bertendensi untuk melakukan universalisasi nilai dalam interaksi sosial untuk menjaga relasi kuasa yang ada, sedangkan kehidupan sosial dipenuhi oleh keragaman karakter manusia, perubahan ruang dan waktu, serta perbedaan institusi dan norma sosial. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, akan tetapi memiliki sifat yang bertentangan satu sama lain. Teraktualisasinya ideologi yang memiliki kecenderungan untuk menyeragamkan segala sesuatu selalu bertentangan dengan realitas sosial yang tidak mungkin diseragamkan. Oleh karena itu, setiap ideologi membangun pemaknaan sosial yang mengarahkan

manusia untuk berkesadaran, berkehendak, dan bertindak berdasarkan perspektif umum melalui nilai ideologisnya.

Pengaktualisasi ideologi melalui kegiatan sehari-hari dalam kehidupan sosial akan menciptakan identitas sosial. Individu yang telah menganut ideologi tersebut akan berusaha meyakinkan individu lainnya akan kebenaran ideologi tersebut. Kenyataan tersebut memungkinkan terbentuklah ideologi kelompok dan ideologi bangsa atau negara. Identitas sosial yang hidup dalam diri setiap pribadi berkembang dalam kesadaran komunal dan penyeragaman kehendak yang dikendalikan oleh institusi dan norma sosial. Nilai ideologis yang diyakini secara individual oleh masyarakat luas menjadi pemaknaan sosial bahkan pandangan hidup.

Pengklaiman nilai serta makna tunggal oleh suatu ideologi seringkali memunculkan kontradiksi yang menyebabkan polemik dalam kehidupan sosial. Sepertihalnya dalam fenomena pemilu yang menampilkan nilai ideologis berupa nilai kesetaraan—sebagai suatu upaya membangun pemerintahan baru setelah Orde Baru lengser—tidak selamanya secara murni dapat dipertahankan sebagai nilai bersama karena selalu saja dimanfaatkan oleh para calon wakil rakyat beserta partai politik mereka yang berupaya mendapatkan kekuasaan melalui berbagai manipulasi selama kampanye. Nilai kesetaraan juga terus mengalami peralihan dalam sistem pemerintahan karena para wakil rakyat terpilih melupakan nilai yang melimpahkan kewenangan kepada mereka untuk memegang kekuasaan atas nama rakyat, mereka tidak lagi bertindak berdasarkan nilai tersebut, melainkan sebaliknya justru bertindak secara sewenang-wenang yang terwujud dalam bentuk praktik KKN. Praktik itu telah dianggap sebagai kewajaran dan mengakar dalam kebudayaan Indonesia karena sudah menjadi kebiasaan dan didukung oleh kondisi sosial yang membenarkan nilai kesewenang-wenangan. Polemik tersebut terjadi sebab kehidupan sosial padasarnya bersifat heterogen, sehingga menghasilkan ideologi yang beragam. Ideologi yang berbeda-beda sebagai produk dari keragaman sosial terus-menerus menimbulkan konflik karena satu sama lain merasa bahwa apa yang mereka yakini adalah nilai yang paling benar.